

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor yang sangat penting dalam membangun serta memajukan suatu negara adalah faktor ekonomi. Dimana kemajuan ekonomi suatu negara selalu dijadikan acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari *Gross National Product* suatu negara yang akan mempengaruhi tingkat kenaikan pendapatan riil per kapita. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi, tentu saja tingkat pendapatan riil tiap daerah memiliki perbedaan. Hal inilah yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia menjadi tidak merata. Umumnya penyerapan tenaga kerja lebih banyak terjadi di kota-kota besar atau provinsi yang padat akan penduduk, salah satunya adalah provinsi Jawa Timur.

Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur dari keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan peluang bagi angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan. Proses pembangunan sering pula dikaitkan dengan proses Industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan salah satu perantara menuju proses pembangunan yang baik dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam hal ini, pertumbuhan penduduk menjadi faktor yang cukup rentan dalam tingkat keberhasilan pembangunan, dimana pertumbuhan penduduk sering diiringi dengan penambahan jumlah angkatan kerja. Kondisi ini terjadi akibat jumlah lapangan pekerjaan yang pergerakannya lambat tidak mampu menyeimbangi kondisi pertumbuhan penduduk yang cepat dan dinamis.

Pembangunan ekonomi memiliki tiga tujuan inti antara lain peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Todaro Michael, 2006).

Proses pembangunan sering kali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi dan pembangunan industri yang merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain pembangunan industri merupakan satu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai pembangunan saja (Sadono Sukirno, 2000).

Proses industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dalam produksi dan perdagangan antar negara yang pada akhirnya sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang mendorong perubahan struktur ekonomi. Oleh karena itu, proses industrialisasi didalam perekonomian sering juga diartikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi (Tulus T.H Tambunan, 2001).

Struktur ekonomi suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari komposisi produk regional menurut sektor-sektor perekonomian. Banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh suatu sektor perekonomian, dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap angkatan kerja. Dengan demikian proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja (Sitanggang, Ignatia Rohana dan Nachrowi, 2004).

Industrialisasi salah satu tujuannya adalah untuk dapat menyerap tenaga kerja yang semakin meningkat dengan semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk. Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial,serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Depnakertrans, 2004).

Pengertian industri menurut Departemen Perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau bahan jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, tidak termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri (Disperindag, 2012).

Salah satu cara untuk memperluas kesempatan kerja adalah melalui pengembangan industri terutama industri yang bersifat padat karya. Pengembangan industri tersebut akan menyebabkan kapasitas produksi meningkat sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja. Selain investasi swasta terdapat investasi pemerintah yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah ini berupa pengeluaran pembangunan pemerintah dan alokasi anggaran pembangunan sektoral merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah, mungkin juga bagian dari permintaan agregat sehingga timbulnya permintaan yang berasal dari APBD di Provinsi Jawa Timur akan berdampak positif terhadap tambahan output. Tambahan output ini akan menyebabkan tambahan kesempatan kerja karena banyaknya tenaga

kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit output melalui kebijakan public dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran. Melalui pengeluaran pembangunan pemerintah diharapkan mampu mempengaruhi besarnya kesempatan kerja dalam perekonomian (Hendra Esmara, 1999). Secara teoritis, semakin besar nilai investasi yang dilakukan maka semakin besar pula tambahan penggunaan tenaga kerja (Suparmoko, 1994).

Selain investasi, faktor yang seringkali menjadi permasalahan dalam ketenagakerjaan adalah yang berkaitan dengan upah. Menurut Payaman J. Simanjuntak (2002) permintaan tenaga kerja memiliki hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu. Penentuan besarnya upah minimum menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kemampuan dari masing-masing usaha IKM. Secara praktis tenaga kerja berharap akan mendapatkan tingkat upah yang lebih besar sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Namun sebaliknya jika pengusaha memberikan upah yang tinggi maka operasional dan biaya produksi akan semakin besar sehingga tingkat keuntungan akan semakin rendah. Dengan demikian jika tuntutan upah semakin tinggi maka untuk menjaga biaya operasional dan biaya produksi tetap sama maka kemungkinan besar pengusaha akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Hal ini dapat berakibat pada rendahnya tingkat kesempatan kerja. Sehingga diduga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kesempatan kerja (Payaman J. Simanjuntak, 2002).

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu juga dikaitkan dengan hukum permintaan. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil (Sony Sumarsono, 2003). Hal ini berkaitan dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Semakin tinggi upah atau gaji yang telah diberikan, maka akan mengakibatkan semakin sedikitnya permintaan tenaga kerja, begitu sebaliknya dengan hukum permintaan. Dari latar belakang di atas, peneliti ingin menguji apakah variabel-variabel dalam ulasan sebelumnya, berpengaruh terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja, dengan demikian judul penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut : “Analisis Pengaruh Nilai Investasi, Jumlah Unit Usaha dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri di Provinsi Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah nilai investasi mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 - 2019?
2. Apakah jumlah unit usaha mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 - 2019?
3. Apakah upah minimum mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 - 2019?
4. Apakah nilai investasi, jumlah unit usaha dan upah minimum secara bersama –sama mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 - 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh nilai investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 - 2019.
2. Untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 - 2019.
3. Untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 - 2019.
4. Untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh nilai investasi, jumlah unit usaha dan upah minimum secara bersama sama terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009 - 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Untuk Dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Menambah pengetahuan di bidang ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur khususnya mengenai hubungan nilai investasi, jumlah unit usaha dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja serta memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan ketenagakerjaan.
- b. Untuk Masyarakat memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan serta menjadi bahan studi atau *literature* tambahan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Untuk Peneliti dapat dijadikan sebagai penambah wawasan mengenai hubungan nilai investasi, jumlah unit usaha dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja serta menjadi sarana penerapan teori dan konsep ilmu pengetahuan yang diterima melalui perkuliahan.